



PROFIL PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
2020





PROFIL PENDIDIKAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
2020



PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

ISSN : 2723-1801
Nomor Publikasi : 13000.2158
Katalog : 4101032.13
Ukuran buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 56

Naskah:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sumatera Barat

Ilustrasi Kulit:

Icon Anak Sekolah

Sumber Gambar:

freepik.com/

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh:

CV. Graphic Dwipa (cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 43 huruf b)

PROFIL PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT 2020

Pengarah : Ir. Herum Fajarwati, MM

Penanggung Jawab : Krido Saptono, S.Si, M.Si

Editor : Krido Saptono, S.Si, M.Si
Iman Teguh Raharto, S.Si, M.Si
Ir. Yunimarlita
Dewi Astuti, S.ST, M.Stat
Hamdi Rafiqi, S.ST

Penulis : Mila Artati, S.ST, M.Stat

Pengolah Data : Mila Artati, S.ST, M.Stat

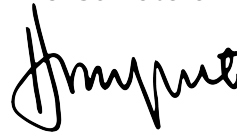
KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan melalui pengajaran dan pelatihan. Melalui pendidikan diharapkan akan terwujud Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, sehingga selayaknya program pendidikan ini direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2020 menggambarkan kondisi pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Data yang disajikan bersumber dari olahan Buku Sumatera Barat Dalam Angka 2021 serta olahan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020. Data yang disajikan antara lain sarana prasarana sekolah, tingkat partisipasi sekolah, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan putus sekolah.

Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengguna data khususnya pengguna data pendidikan. Demi meningkatkan kualitas publikasi di masa mendatang, kritik dan saran dari pengguna data akan kami terima. Kemudian, kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Padang, Desember 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat



Ir. Herum Fajarwati, MM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sumber Data dan Metodologi	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
2. Metodologi	7
2.1 Sumber Data	9
2.2 Konsep dan Definisi	9
3. Sarana dan Prasarana Pendidikan	15
3.1 Sarana Pendidikan	17
3.2 Pendidikan Anak Usia Dini	21
3.3 Partisipasi Sekolah	26
3.4 Angka Partisipasi Sekolah	28
3.5 Angka Partisipasi Kasar	31
3.6 Angka Partisipasi Murni	33
4. Hasil Pembangunan Pendidikan	37
4.1 Angka Melek Huruf	39
4.2 Rata-rata Lama Sekolah	41
4.3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	43
4.4 Angka Putus Sekolah	45
5. Penutup	49
Daftar Pustaka	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1.1 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sumatera Barat, 2019-2020.....	18
3.1.2 Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020.....	19
3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2020.....	23
3.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2020.....	24
3.3.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat, 2020.....	27
3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020	30
3.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020	32
3.6.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020.....	34
4.1.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020.....	40
4.4.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Sumatera Barat, 2020.....	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.2.1 Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020 atau Tahun Ajaran Sebelumnya Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020.....	22
3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020.....	29
4.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2020.....	42
4.3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2020.....	44
4.3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2020.....	45

PENDAHULUAN

Indikator Pendidikan Menjadi Monitoring Pembangunan Pendidikan

UUD 1945



Pasal 31:

"Tiap-tiap Warga Negara Berhak Mendapat Pengajaran"

Tujuan 4 SDGs



"Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua"

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup, dengan makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Semakin baik kualitas sumber daya manusianya akan lebih memberikan jaminan untuk hidup yang lebih baik.

Tujuan pembangunan di bidang pendidikan tertuang dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) khususnya pada tujuan keempat yaitu pendidikan berkualitas yaitu menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Bappenas, 2021). Untuk mewujudkannya, pemerintah telah melakukan berbagai langkah dalam perbaikan pendidikan bangsa, yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut sesuai dengan amanat UUD 1945 yang menyiratkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dalam arti luas adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan anak dan berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan dan ketidaksetaraan (Unicef, 2012).

Disamping itu, kemajuan teknologi juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja dan mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang

layak. Untuk itu, mutu pendidikan menjadi faktor penting agar ada kecocokan antara pendidikan dan lapangan kerja sehingga pengangguran dapat berkurang. Mutu pendidikan dapat diukur melalui ketersediaan tenaga pengajar yang memiliki standar kompetensi guru.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan misalnya dengan mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan, memberikan tunjangan profesi guru, bantuan operasional sekolah, mengembangkan akses terhadap pendidikan anak usia dini, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, memperbaiki kurikulum serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Sejak tahun 1994 pemerintah juga telah melaksanakan program wajib belajar 9 tahun yaitu 6 tahun di pendidikan dasar ditambah 3 tahun pada pendidikan menengah. Semakin lamanya usia wajib belajar ini diharapkan tingkat pendidikan anak semakin membaik, dan tentunya akan berdampak pada tingkat kesejahteraan penduduk.

Untuk memantau perkembangan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan dapat dilihat dengan pendekatan indikator pendidikan. Indikator pendidikan yang akan dibahas antara lain, kemampuan intelektual dasar yang meliputi Angka Partisipasi untuk PAUD, dan Angka Melek Huruf (AMH) dan *Mean Years of Schooling* (MYS) atau rata-rata lama sekolah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan meliputi Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

1.2 Tujuan

Ada 2 (dua) tujuan pokok penulisan Publikasi "Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2020", yaitu:

1. Untuk mengetahui indikator proses pembangunan manusia yang telah dilakukan oleh Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 yang diwakili dengan data tentang sarana dan prasarana pendidikan seperti jumlah guru, sekolah dan murid.
2. Untuk mengetahui indikator hasil pembangunan di bidang pendidikan yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Barat tahun

2020 yang diwakili dengan indikator angka partisipasi sekolah, angka melek huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan dan rata-rata lama sekolah.

1.3 Sumber Data dan Metodologi

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPS pada bulan Maret. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan yang disajikan dalam indikator pendidikan ini menggunakan metode analisis deskriptif baik untuk Provinsi Sumatera Barat maupun perbandingan antara daerah perdesaan dan perkotaan, golongan pengeluaran serta perbandingan antar jenis kelamin.

1.4 Sistematika Penulisan

Pembahasan utama dirinci ke dalam lima bab sesuai tema besar profil statistik pendidikan dengan sistematika sebagai berikut:

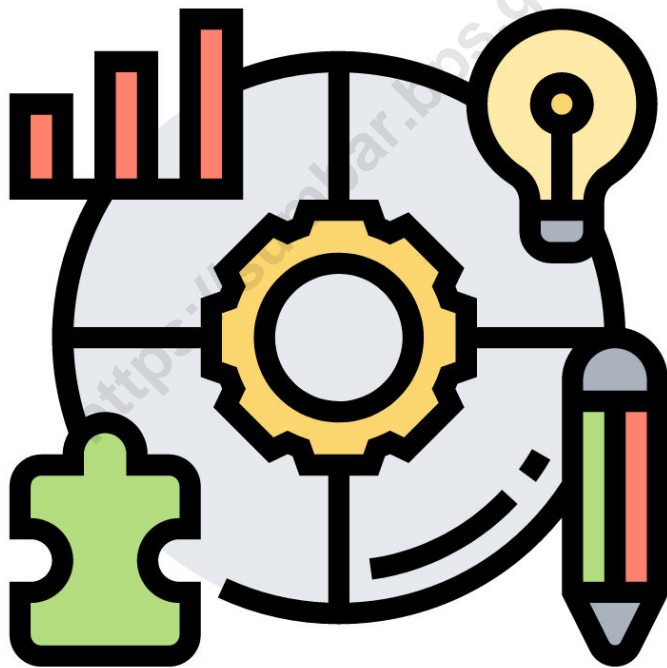
- Bab I berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan dan sistematika penulisan.
- Bab II metodologi, berisi tentang ruang lingkup dan konsep/ definisi yang digunakan penulisan publikasi.
- Bab III menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang mencakup informasi umum tentang sarana dan prasarana pendidikan yang memuat dua bahasan utama yaitu, partisipasi pendidikan anak usia dini dan partisipasi sekolah dasar dan menengah.
- Bab IV menyajikan pembahasan mengenai hasil pembangunan pendidikan yang tercermin dari indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Selain itu indikator angka putus

sekolah juga disajikan untuk melihat adanya hambatan/ kegagalan pembangunan pendidikan.

- Bab V penutup, berisi ringkasan tentang kondisi pendidikan penduduk Sumatera Barat secara umum.

<https://sumbar.bps.go.id>

METODOLOGI



BAB 2

METODOLOGI

2.1 Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan dan penyusunan indikator pendidikan dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPS. Selain itu digunakan pula data yang bersumber dari instansi terkait lainnya di lingkungan Provinsi Sumatera Barat.

2.2 Konsep dan Definisi

Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

Penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Konsep satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Kepala Rumah Tangga (KRT) adalah salah seorang dari Anggota Rumah Tangga (ART) yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT.

Anggota Rumah Tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru.

Rasio kelas-guru adalah perbandingan antara jumlah kelas pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru.

Rasio murid-kelas adalah perbandingan jumlah murid dalam suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah kelas yang tersedia.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, meliputi SD/MI/ sederajat, SMP/ MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat dan Perguruan Tinggi (PT).

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Meliputi pendidikan kecakapan hidup (kursus), pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan (paket A, paket B dan paket C) serta pendidikan lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini. Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

Tidak/belum pernah sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang tamat Taman Kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.

Masih bersekolah adalah apabila terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal dan non formal (Paket A, Paket B dan Paket C), baik yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.

Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Pendidikan pra sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/ MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B dan paket C.

Tamat sekolah adalah telah menyelesaikan pelajaran pada kelas/ tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika ia mengikuti ujian dan lulus maka dianggap tamat.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat/ijazah.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah.

SD/MI meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat.

SMP/MTs meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP Kejuruan dan sederajat.

SMA/MA meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat.

PT meliputi jenjang pendidikan Diploma I, II, III dan IV dan sederajat.

Dapat membaca dan menulis, artinya dapat membaca dan menulis kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu.

- **Huruf latin**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin.
- **Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya.
- **Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya.

Tidak dapat membaca dan menulis, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya.

Catatan:

1. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille digolongkan dapat membaca dan menulis huruf latin.

2. Orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis, kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis digolongkan dapat membaca dan menulis.
3. Orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis atau sebaliknya, dianggap tidak dapat membaca dan menulis.

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf Latin atau huruf lainnya.

Rata-Rata Lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka Putus Sekolah (APTs) adalah persentase siswa/murid dengan jenjang pendidikan tertentu yang tidak lagi mengikuti pendidikan pada jenjang tersebut.

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Provinsi Sumatera Barat, 2020

Perkembangan Jumlah Sekolah



Paud

-3,51%

SMP

0,08%

SD

-0,16%

SMA

-1,43%

"Pada tahun 2020, di Sumatera Barat penurunan jumlah bangunan sekolah terbanyak terdapat pada jenjang pendidikan PAUD."

Angka Partisipasi Sekolah



7-12 Tahun

99,61%



13-15 Tahun

96,60%



16-18 Tahun

83,68%



19-24 Tahun

35,96%

BAB 3

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

3.1 Sarana Pendidikan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Sesuai bunyi Pasal 45 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Gambaran tentang kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Sumatera Barat akan dibahas pada bab ini, yaitu jumlah sekolah, murid dan guru.

Tabel 3.1.1 memperlihatkan perkembangan jumlah sekolah dua tahun terakhir. Sebagian besar jenjang pendidikan mengalami penurunan jumlah bangunan sekolah, penurunan tertinggi pada jenjang pendidikan Pra-sekolah, yaitu TK/PAUD/Sejenisnya (-3,51 persen). Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat mengalami penurunan (-0,16 persen) dan SMA/ sederajat mengalami pengurangan jumlah bangunan sekolah (-1,43 persen). Akan tetapi, pada jenjang pendidikan SMP/ Sederajat mengalami kenaikan (0,08 persen).

Pertumbuhan jumlah sekolah biasanya diiringi dengan peningkatan jumlah murid. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumatera Barat selama dua tahun terakhir, pertumbuhan jumlah murid terjadi pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Sementara itu, persentase pertumbuhan jumlah murid di sebagian besar jenjang pendidikan justru menurun. Penurunan jumlah murid tertinggi terjadi pada jenjang TK/PAUD/ sejenisnya (-8,11 persen) dan diikuti jenjang pendidikan SMP/ Sederajat (-1,57 persen) serta SD/ sederajat (-1,13 persen).

Tabel 3.1.1 Perkembangan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sumatera Barat, 2019-2020

Lembaga	Jumlah 2019/2020	Jumlah 2020/2021	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
TK/PAUD/Sejenisnya			
- Jumlah	2.877	2.776	-3,51
- Jumlah Murid	100.275	92.143	-8,11
- Jumlah Guru	10.068	10.010	-0,58
SD/Sederajat			
- Jumlah	4.381	4.374	-0,16
- Jumlah Murid	655.873	648.474	-1,13
- Jumlah Guru	46.823	48.881	4,40
SMP/Sederajat			
- Jumlah	1.243	1.244	0,08
- Jumlah Murid	311.428	306.527	-1,57
- Jumlah Guru	26.133	27.822	6,46
SMA/Sederajat			
- Jumlah	771	760	-1,43
- Jumlah Murid	279.509	282.949	1,23
- Jumlah Guru	22.836	24.051	5,32

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2021 (diolah)

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada pasal 17 disebutkan guru tetap pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila mengajar di satuan pendidikan yang minimal jumlah siswa terhadap gurunya sebagai berikut: jenjang TK/RA = 15:1; jenjang SD/ sederajat = 20:1; jenjang MI/ sederajat = 15:1; jenjang SMP/ sederajat = 20:1; jenjang MTs/ sederajat = 15:1; jenjang SMA/ sederajat = 20:1; jenjang MA/ sederajat = 15:1; jenjang SMK/ sederajat = 15:1; jenjang MAK/ sederajat = 12:1. Beban kerja guru dapat dilihat dari rasio murid-guru. Rasio murid-guru ialah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru (baik guru layak mengajar maupun tidak) pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.1.2 Jumlah dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah		Rasio
	Murid	Guru	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	655.873	46.823	14
SMP/ sederajat	311.428	2.6133	12
SMA/ sederajat	279.509	22.836	12

Sumber: Sumatera Barat Dalam Angka 2021 (diolah)

Rasio murid-guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh seorang guru. Data Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan rasio murid-guru semua jenjang pendidikan untuk TA 2020/2021 sudah memenuhi standar ideal. Angka rasio murid-guru yang besar mengindikasikan bahwa satu orang guru harus bertanggung jawab terhadap banyak murid. Dengan kata lain, semakin besar rasio murid-guru, semakin kecil akses murid terhadap guru. Secara umum dapat diasumsikan bahwa rasio murid-guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil (UNESCO, 2009). Hal ini memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan siswa secara individu sehingga mendukung prestasi siswa menjadi lebih baik dan dapat menjadikan suasana belajar mengajar yang nyaman sehingga hasil belajar mengajarnya lebih optimal.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini juga tercantum dalam tujuan SDGs keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah, dengan target sasaran tahun 2024 sebagai berikut:

- Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD sebesar 34,36 persen.
- APK jenjang pendidikan SD/MI/Sederajat sebesar 106,71 persen.
- APK jenjang pendidikan SMP/MTs/Sederajat sebesar 95,43 persen.
- APK jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/Sederajat sebesar 84,02 persen.
- APK jenjang pendidikan Perguruan Tinggi (PT) sebesar 43,86 persen.

Target yang ditetapkan pada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga sejalan dengan visi dan misi daerah yang dituangkan di dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Adapun visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah “Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera”. Visi ini didukung oleh 5 misi yang akan dicapai pada akhir masa pemerintahan Gubernur Irwan Prayitno yang berakhir di tahun 2021. Pada misi ke-3 yang berbunyi “Meningkatkan Sumber daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter, dan Berkualitas Tinggi” terdapat 2 tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.

Masing-masing tujuan punya target kinerja yang akan dicapai sampai tahun 2021. Beberapa indikator pendidikan tujuan 1 pada misi ke-3 menargetkan akan mencapai nilai rata-rata lama sekolah tahun 2020 sebesar 8,85 tahun. Pada tujuan 2, beberapa target pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2020 adalah APK PAUD sebesar 76,20 persen, APM SD sebesar 99,62 persen, APM SMP sebesar 81,50 persen, APM SMA sebesar 73,30 persen, dan APS (Angka Putus Sekolah) SMA sebesar 0,63 persen.

Apabila dilihat dengan hasil yang dicapai di Sumatera Barat melalui indikator pendidikan yang diolah dari Susenas 2020 dapat

dilihat sejauh mana capaian provinsi akan dapat mencapai target renstra nasional dan target kinerja yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Indikator partisipasi sekolah digunakan untuk memantau program pendidikan yang telah digulirkan pemerintah. Partisipasi sekolah menggambarkan efektifitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif suatu program.

3.2 Pendidikan Anak Usia Dini

Berbagai penelitian mengungkapkan pentingnya pendidikan usia dini bagi perkembangan karakter anak-anak. Para psikolog, neurosains, dan pakar pendidikan pun mengamini hal ini. Salah satunya Robert Fulghum (1986), pendidik dan penulis asal Amerika Serikat, mengatakan, fondasi karakter anak dapat dibangun sejak mereka masuk pendidikan anak usia dini (PAUD).

Pendidikan yang diberikan untuk anak usia 3-6 tahun tidak hanya bertujuan mengenalkan anak pada bidang-bidang pelajaran ataupun melatihnya berinteraksi dengan anak sebaya. Lebih jauh dari itu, PAUD memiliki fungsi utama mengembangkan semua aspek perkembangan anak, meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik (motorik kasar dan halus), sosial dan emosional.

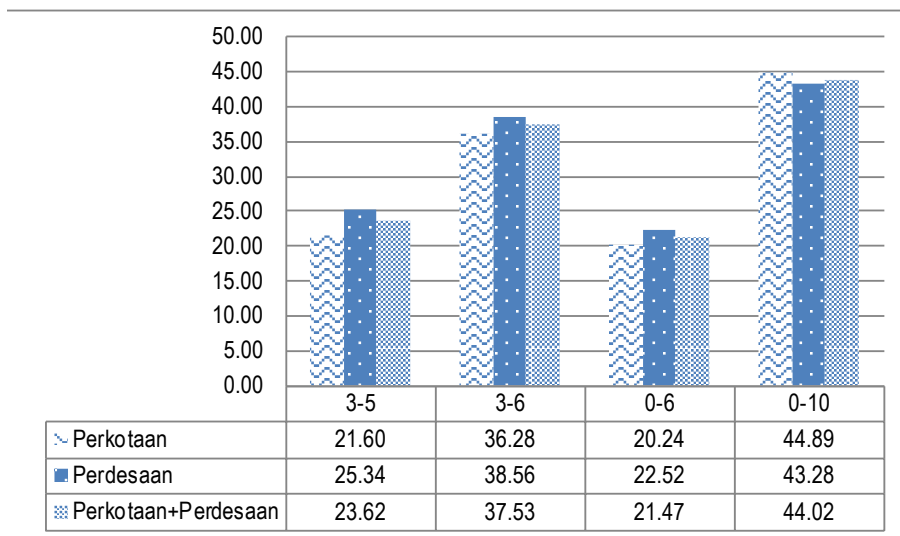
Melihat pentingnya pembentukan anak sebagai dasar penentu kualitas bangsa di masa mendatang, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan dukungan penuh dengan pendidikan awal pada anak melalui program wajib Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) satu tahun pra-SD dengan penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Selanjutnya, dalam peningkatan mutu kelembagaan PAUD, pemerintah mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 84 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor

137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Hal-hal mengenai syarat pendirian PAUD, standar tingkat pencapaian pengembangan anak pada PAUD, standar isi, proses, dan penilaian PAUD, tenaga pendidik, hingga proses penutupan PAUD telah diatur secara lengkap pada peraturan tersebut. Pemerintah juga telah merintis program PAUD baru bagi desa-desa yang belum terdapat layanan anak usia dini, sejalan dengan program satu desa satu PAUD.

Pengalaman belajar di PAUD akan membantu anak untuk lebih siap dalam menerima pelajaran formal di bangku pendidikan selanjutnya (SD) sehingga sedikit anak yang mengulang kelas. Hal ini yang menjadi salah satu alasan UNESCO merekomendasikan setiap anak mendapatkan pendidikan anak usia dini pada usia pra-sekolah. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal (TK/RA/ sederajat), non formal (KB/TPA/sejenisnya), dan/ atau informal (keluarga/lingkungan). Pendidikan pada jenjang ini dapat disebut sebagai pendidikan pra-SD.

Gambar 3.2.1 Persentase Anak Usia 0-10 Tahun yang Pernah/ Sedang Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Tahun Ajaran 2019/2020 atau Tahun Ajaran Sebelumnya Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Pada Gambar 3.2.1, pada tahun ajaran 2019/2020 atau tahun ajaran sebelumnya, persentase anak usia 0-6 tahun yang pernah/ sedang mengikuti pendidikan pra sekolah di Sumatera Barat mencapai 21,47 persen. Berdasarkan tipe daerah, partisipasi pra sekolah di perdesaan lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yaitu 22,52 persen berbanding 20,24 persen dengan selisih 2,28 persen.

Selain partisipasi PAUD, publikasi ini juga menyajikan indikator lain terkait PAUD yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2.1 dan Tabel 3.2.2. APK PAUD merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang mengikuti pendidikan pra sekolah, baik Taman Kanak-Kanak (TK)/Bushtanul Athfal (BA)/Raudhatul Athfal (RA) maupun berbagai jenis PAUD lainnya (kecuali kelompok bermain dan tempat penitipan anak), terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang bersesuaian.

Pada perhitungan APK PAUD dan APM PAUD menggunakan dua kelompok umur yaitu 3-5 tahun dan 3-6 tahun. Perbedaan tersebut dilakukan karena kelompok umur 3-5 tahun sesuai dengan penetapan UNESCO dalam penghitungan indikator pendidikan usia dini, sedangkan kelompok umur 3-6 tahun sesuai yang tercantum dalam Renstra Kemdikbud 2015-2019. Oleh karena itu agar keterbandingan keduanya dapat dicermati, maka pengelompokan kedua jenis kelompok umur tetap dilakukan.

Tabel 3.2.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	
	Usia 3-5 Tahun	Usia 3-6 Tahun
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	35,83	27,52
Laki-Laki	36,57	29,01
Perempuan	34,96	25,87
Perdesaan	43,04	31,79
Laki-Laki	45,56	32,64
Perempuan	40,68	30,94
Perkotaan + Perdesaan	39,73	29,87
Laki-Laki	41,18	30,97
Perempuan	38,22	28,73

Sumber: Susenas Maret 2020

Dalam mewujudkan penyediaan pendidikan pra SD (PAUD) yang bermutu untuk seluruh laki-laki dan perempuan baik di perkotaan maupun di perdesaan, pemerintah pusat dan daerah telah menyusun agenda pendidikan secara berkesinambungan. Pada tahun 2020, APK PAUD di Sumatera Barat untuk kelompok umur 3-6 tahun sebesar 29,87 persen. Hal ini menandakan bahwa dari 10 anak usia 3-6 tahun, setidaknya terdapat 2-3 anak diantaranya mengenyam pendidikan anak usia dini. Angka ini masih cukup jauh di bawah target pembangunan nasional yaitu sebesar 34,36 persen pada tahun 2024.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, APK PAUD anak perempuan baik kelompok umur 3-5 tahun maupun 3-6 tahun cenderung lebih rendah dibandingkan dengan APK PAUD anak laki-laki. Menurut tipe daerah, terdapat kesenjangan APK PAUD daerah perkotaan dan perdesaan yaitu 35,83 persen berbanding 43,04 persen untuk kelompok umur 3-5 tahun dan 27,52 persen berbanding 31,79 persen untuk kelompok umur 3-6 tahun. Rendahnya partisipasi PAUD untuk daerah perkotaan dimungkinkan karena wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan anak-anak yang biasa PAUD tidak bersekolah lagi. Berbeda dengan daerah perdesaan yang tidak begitu terdampak oleh pandemi.

Tabel 3.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD Anak Usia 3-5 Tahun dan 3-6 Tahun di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	
	Usia 3-5 Tahun	Usia 3-6 Tahun
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	21,02	27,48
Laki-Laki	22,31	29,01
Perempuan	19,50	25,79
Perdesaan	24,50	31,41
Laki-Laki	24,90	32,41
Perempuan	24,13	30,42
Perkotaan + Perdesaan	22,90	29,64
Laki-Laki	23,64	30,85
Perempuan	22,13	28,40

Sumber: Susenas Maret 2020

Proporsi penduduk kelompok umur tertentu yang sedang mengikuti pendidikan prasekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang bersesuaian dikenal sebagai APM PAUD. APM PAUD menunjukkan persentase anak yang benar-benar mengenyam PAUD pada usia yang bersesuaian. Sejalan dengan APK PAUD, kelompok umur 3-5 tahun, APM PAUD anak laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan yaitu 23,64 persen berbanding 22,13 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur 3-6 tahun, APM PAUD anak laki-laki (30,85 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan anak perempuan (28,40 persen).

Kesadaran orang tua untuk lebih memilih memasukkan anaknya, khususnya yang berusia 6 tahun, pada pendidikan prasekolah sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar mulai meningkat. Hal ini terlihat dari perbedaan yang cukup besar antara APM PAUD usia 3-5 tahun dan APM PAUD usia 3-6 tahun. Perbedaan tersebut menandakan bahwa kontribusi anak usia 6 tahun terhadap murid PAUD secara keseluruhan cukup besar. Di sisi lain, orang tua banyak yang lebih memahami bahwa usia 7 tahun merupakan usia ideal anak secara fisik maupun psikis untuk memasuki jenjang sekolah dasar.

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah, APM PAUD pada kelompok umur 3-5 tahun dan kelompok umur 3-6 tahun di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perdesaan. Hal ini sejalan dengan APK PAUD dimana daerah perkotaan lebih rendah dari daerah perdesaan. Hal ini dimungkinkan karena daerah perkotaan lebih terdampak dalam pandemi dibandingkan dengan daerah perdesaan.

Pada kelompok umur 3-5 tahun, selisih APK dan APM PAUD cenderung besar yaitu sekitar 16,83 persen, sedangkan untuk kelompok umur 3-6 tahun APK dan APM PAUD cenderung tidak berbeda signifikan. Hal ini juga mendukung pernyataan masih banyak orang tua yang memasukkan anaknya yang berusia 6 tahun ke PAUD sebelum memasuki pendidikan dasar.

3.3 Partisipasi Sekolah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan ilmu teknologi yang terjadi secara terus menerus. Dengan pendidikan yang baik akan dihasilkan tenaga kerja yang andal dan mampu melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka memacu pembangunan di berbagai bidang. Dengan pendidikan yang baik juga akan meningkatkan daya saing anak bangsa dalam kancah pergaulan global.

Memanfaatkan fasilitas pendidikan terbuka untuk semua penduduk, tidak hanya pada kelompok penduduk usia sekolah saja. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari penduduk menurut kategori partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: tidak pernah sekolah, masih bersekolah, dan tidak bersekolah lagi.

Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal (pendidikan dasar yaitu SD/MI dan SMP/MTs, pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA dan pendidikan tinggi yaitu PT) maupun pendidikan non formal (Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA) yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi swasta.

Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 4,91 persen, penduduk yang masih sekolah sebesar 31,32 persen dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi sebesar 63,77 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat penduduk usia 5 tahun ke atas yang belum/tidak menikmati pendidikan. Menurut daerah tempat tinggal, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah bersekolah di perdesaan (5,42 persen) lebih tinggi daripada penduduk perkotaan (4,35 persen). Hal ini disebabkan akses pendidikan penduduk perkotaan jauh lebih baik dibandingkan dengan penduduk perdesaan, dan ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah perkotaan lebih lengkap dan lebih memadai dibandingkan

daerah perdesaan. Hal tersebut, tentunya perlu perhatian pemerintah yang lebih ekstra, khususnya untuk daerah perdesaan dalam hal meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan agar partisipasi sekolah masyarakat dapat ditingkatkan.

Tabel 3.3.1 Persentase Penduduk Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Partisipasi Sekolah Formal dan Non Formal			Jumlah
	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	4,35	31,80	63,85	100,00
Laki-laki	4,12	31,91	63,98	100,00
Perempuan	4,60	31,68	63,72	100,00
Perdesaan	5,42	30,88	63,70	100,00
Laki-laki	5,28	30,65	64,08	100,00
Perempuan	5,57	31,11	63,32	100,00
Perkotaan + Perdesaan	4,91	31,32	63,77	100,00
Laki-laki	4,71	31,26	64,03	100,00
Perempuan	5,11	31,38	63,51	100,00

Sumber: Susenas Maret 2020

Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih sekolah di daerah perkotaan (31,80 persen) relatif sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (30,88 persen). Sedangkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi di perkotaan (63,85 persen) relatif tidak berbeda dibandingkan penduduk di perdesaan (63,70 persen).

Faktor jenis kelamin juga berpengaruh terhadap akses masyarakat pada pendidikan. Tabel 3.3.1 menunjukkan bahwa secara keseluruhan persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (5,11 persen) relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki (4,71 persen). Di daerah perkotaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/belum pernah sekolah tercatat sebesar 4,60 persen relatif lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki sebesar 4,12 persen. Sementara di

daerah perdesaan, persentase penduduk perempuan yang tidak/ belum pernah sekolah sebesar 5,57 persen dan laki-laki sebesar 5,28 persen. Ini mengindikasikan bahwa baik di daerah perdesaan maupun perkotaan akses pendidikan bagi perempuan sedikit lebih tinggi dari laki-laki.

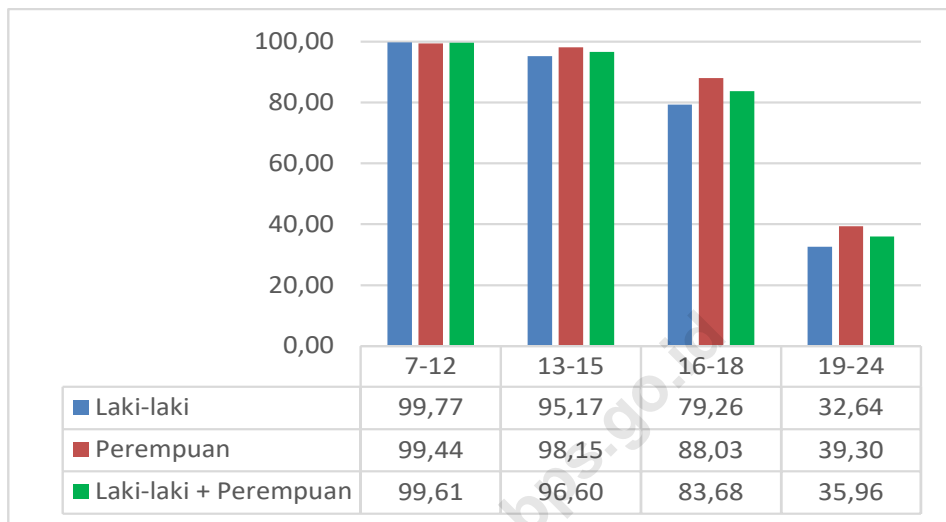
3.4 Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan, misalnya pertumbuhan jumlah murid, lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah.

Partisipasi sekolah yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal dan nonformal seseorang. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Gambar 3.4.1 memperlihatkan data APS menurut kelompok umur dan jenis kelamin di Sumatera Barat tahun 2020. Berdasarkan kelompok umurnya, APS pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,61 persen atau dapat dikatakan hampir semua anak usia 7-12 tahun sudah bersekolah. Semakin meningkat kelompok umur, nilai APS semakin menurun yang menandakan bahwa semakin bertambah usia penduduk, partisipasi sekolahnya juga semakin menurun. Terlihat pula APS untuk kelompok umur yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan SMA/ sederajat relatif kecil yakni 83,68 persen anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke sekolah menengah, di saat negara kita sedang gencar mengusahakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Gambar 3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Menurut tipe daerah, APS untuk daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan. Dapat dilihat pula seiring bertambahnya usia, perbedaan APS perkotaan dan perdesaan semakin besar. Perbedaan terbesar berada pada kelompok umur 19-24 tahun yang merupakan usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi, dengan perbedaan sekitar 20 persen.

Jika dilihat lebih dalam, ketersediaan perguruan tinggi di perdesaan masih sedikit, selain itu biaya pendidikan yang relatif tinggi kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke tingkat perguruan tinggi. Di tambah lagi, faktor ekonomi juga mendorong seseorang, khususnya di perdesaan untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan lebih memilih bekerja.

Lebih lanjut, Tabel 3.4.1 menyajikan APS menurut kelompok umur dan status ekonomi rumah tangga. Pada tabel tersebut terlihat bahwa APS anak usia sekolah akan semakin meningkat seiring dengan peningkatan pengeluaran rumah tangga. Hal ini terlihat pada APS di kelompok umur 7-12 tahun, kelompok umur 13-15 tahun dan kelompok umur 16-18 tahun. Pada ketiga kelompok umur ini, APS

untuk anak-anak yang berasal dari pengeluaran rumah tangganya sedang dan tinggi, lebih tinggi dibandingkan APS untuk anak-anak yang pengeluaran rumah tangganya rendah.

Tabel 3.4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tipe Daerah, Status Ekonomi Rumah Tangga Dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Status Ekonomi Rumah Tangga	Kelompok Umur			
	7-12	13-15	16-18	19-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	99,59	97,12	87,34	45,52
40% bawah	99,56	96,30	77,78	32,03
40% menengah	99,40	98,31	86,46	39,72
20% atas	100,00	96,48	97,60	59,54
Perdesaan	99,62	96,18	79,92	25,23
40% bawah	99,65	95,68	76,93	21,70
40% menengah	99,51	96,18	81,61	27,44
20% atas	100,00	99,87	86,50	29,88
Perkotaan + Perdesaan	99,61	96,60	83,68	35,96
40% bawah	99,62	95,91	77,27	25,75
40% menengah	99,46	97,16	83,88	33,22
20% atas	100,00	97,55	95,09	53,56

Sumber: Susenas Maret 2020

Pada kelompok umur 7-12 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 99,46 persen dan 100,00 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun, APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi yaitu berturut-turut 97,16 persen dan 97,55 persen. Untuk kelompok umur 16-18 tahun dengan pengeluaran rumah tangga sedang dan tinggi, APS-nya berturut-turut 83,88 persen dan 95,09 persen. Ketimpangan yang cukup tinggi terdapat pada APS dengan kelompok umur 19-24 tahun, dimana APS yang berasal dari pendapatan rumah tangga sedang dan tinggi berturut-turut 33,22 persen dan 53,56 persen.

Dilihat menurut tipe daerah, terdapat pola yang sama. Pada umumnya, semakin meningkat pengeluaran rumah tangga maka semakin meningkat pula APS anak usia sekolah. Pola tersebut terjadi di sebagian besar kelompok umur pendidikan pada daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada kelompok umur 13-15 tahun, 16-18 tahun dan 19-24 tahun, APS terendah berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga kategori rendah. Namun, pada kelompok umur 7-12 tahun, APS terendah berada pada kelompok pengeluaran rumah tangga kategori menengah.

3.5 Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK jenjang tersebut akan lebih dari 100. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa hal seperti adanya pendaftaran siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Pada Tabel 3.5.1 terlihat APK untuk SD/ sederajat secara keseluruhan, baik laki-laki maupun perempuan, daerah perkotaan maupun perdesaan, nilainya lebih dari 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa usia anak yang mengenyam pendidikan SD/ sederajat masih ada yang berada di luar range 7-12 tahun. Dengan kata lain, murid SD yang masih bersekolah lebih banyak dibandingkan jumlah anak pada usia SD (7-12 tahun). Hal ini terjadi karena masih ada orang tua yang mendaftarkan anak yang belum mencapai usia 7 tahun langsung ke sekolah dasar tanpa melewati PAUD terlebih dahulu, atau karena masih tingginya yang tinggal kelas atau mengulang kelas.

Semakin tinggi jenjang pendidikan, nilai APK juga semakin rendah. APK jenjang pendidikan SMP/ sederajat pada tahun 2020 sebesar 92,33 persen, angka ini masih di bawah target pemenuhan RPJMN untuk tahun 2024 sebesar 95,43 persen untuk APK SMP/ sederajat. Hal yang sama, APK PT 19-24 tahun (yang dipakai pada RPJMN) juga masih di bawah target 2024 (36,56 persen) sebesar 43,86 persen. Akan tetapi, APK SD/ sederajat (108,68 persen) dan APK SMA/ sederajat (90,01 persen), sudah mencapai target RPJMN 2020-2024 dengan target APK SD/ sederajat yaitu 106,71 persen dan APK SMA/ sederajat 84,02 persen.

Tabel 3.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	APK			
	SD	SMP	SMA	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	107,45	92,69	94,94	47,79
Laki-laki	107,38	94,10	96,23	39,89
Perempuan	107,52	91,10	93,74	55,72
Perdesaan	109,66	92,05	84,94	23,96
Laki-laki	111,57	88,37	77,15	21,17
Perempuan	107,73	95,87	93,05	26,77
Perkotaan + Perdesaan	108,68	92,33	90,01	36,56
Laki-laki	109,67	90,97	86,56	31,05
Perempuan	107,64	93,80	93,41	42,10

Sumber: Susenas Maret 2020

Di Sumatera Barat antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Sudah tidak ada lagi diskriminasi gender dalam memperoleh pendidikan. Hal ini terlihat dari data APK laki-laki dan perempuan yang cenderung tidak terdapat perbedaan yang berarti. Hanya pada jenjang SD sederajat, APK SD laki-laki (109,67 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan (107,64 persen). Sedangkan pada jenjang SMP, SMA dan PT, APK perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Fakta ini mengindikasikan bahwa perempuan yang mengenyam pendidikan

di SMP, SMA dan perguruan tinggi tidak terbatas pada rentang usia 13-15 tahun untuk SMP, 16-18 tahun untuk SMA dan 19-24 tahun untuk PT saja, akan tetapi banyak dari mereka yang berada di luar rentang tersebut tetapi memiliki semangat dalam menuntut ilmu pada tingkat SMP, SMA dan tingkat pendidikan tinggi.

Secara umum, APK di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD/ sederajat. Kesenjangan APK tersebut semakin besar seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Di daerah perkotaan, APK SMP/ sederajat sebesar 92,69 persen, dan APK SMA/ sederajat sebesar 94,94 persen. Untuk daerah perdesaan, APK SMP/ sederajat sebesar 92,05 persen dan APK SMA/ sederajat sebesar 84,94 persen. Sementara itu pada jenjang SD/ sederajat, APK daerah perdesaan (109,66 persen) lebih tinggi daripada daerah perkotaan (107,45 persen). Hal ini memperlihatkan bahwa proporsi murid SD di perdesaan yang berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun lebih besar daripada di perkotaan. Ini menunjukkan sistem pendidikan SD/ sederajat di perkotaan lebih tertib dalam mengatur batas usia penerimaan murid.

3.6 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Sebagai gambaran APM SD/MI adalah proporsi jumlah murid SD/ sederajat yang berusia 7-12 tahun terhadap jumlah seluruh penduduk usia 7-12 tahun. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tabel 3.6.1 menunjukkan APM jenjang pendidikan sekolah dasar sampai dengan APM jenjang perguruan tinggi. APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berusia sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Namun, jika disandingkan dengan target capaian dari APM SD/ sederajat yang terdapat dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021, nilai capaian APM SD/ sederajat pada tahun 2020 belum melampaui target RPJMD tahun 2020 yaitu sebesar 98,80 persen yang mana belum melampaui 99,62 persen yang merupakan target tahun berakhirnya RPJMD 2016-2021.

Tabel 3.6.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Angka Partisipasi Murni			
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat	PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	98,47	79,05	72,78	38,62
Laki-laki	98,64	78,19	71,75	31,30
Perempuan	98,29	80,02	73,74	45,97
Perdesaan	99,06	77,90	64,91	17,25
Laki-laki	99,20	72,33	57,83	15,46
Perempuan	98,92	83,68	72,28	19,05
Perkotaan + Perdesaan	98,80	78,41	68,90	28,55
Laki-laki	98,95	74,99	64,70	23,83
Perempuan	98,65	82,09	73,04	33,30

Sumber: Susenas Maret 2020

Dapat dilihat bahwa pola APM memiliki kemiripan dengan pola APK pada tahun 2020. APM SD/ sederajat memiliki nilai paling tinggi kemudian semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Berdasarkan gender, APM untuk setiap jenjang pendidikan laki-laki dan perempuan cenderung sama dan tidak memiliki perbedaan berarti. Fakta tersebut menunjukkan bahwa secara umum kesenjangan gender di bidang pendidikan khususnya

di Sumatera Barat bukan lagi karena perempuan tidak diberi kesempatan namun kepada pilihan baik oleh perempuan maupun laki-laki. Menurut wilayah tempat tinggal, APM perkotaan dan perdesaan terdapat sedikit perbedaan yang seiring meningkatnya jenjang pendidikan, perbedaan tersebut juga semakin besar, namun hal ini tidak terlihat pada APM SD/ sederajat di perkotaan dan perdesaan yang memiliki nilai cenderung sama. Secara umum APM untuk pendidikan lanjutan di daerah perkotaan lebih tinggi daripada daerah perdesaan. Di daerah perkotaan, APM SD/ sederajat sebesar 98,47 persen, APM SMP/ sederajat sebesar 79,05 persen, APM SMA/ sederajat 72,78 persen dan APM PT sebesar 38,62 persen. Untuk daerah perdesaan, APM SD/ sederajat sebesar 99,06 persen, APM SMP/ sederajat sebesar 77,90 persen, APM SMA/ sederajat 64,91 persen dan APM PT sebesar 17,25 persen.

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Provinsi Sumatera Barat, 2020



Angka Melek Huruf 15+

99,17%

"Pada tahun 2020, di Sumatera Barat masih ada 1 dari 100 penduduk yang tidak bisa baca tulis."

Rata-Rata Lama Sekolah, 2020



Laki-laki

9,32 Tahun

9,36 Tahun



Perempuan

"Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas setara dengan kelas 3 SMP."

BAB 4

HASIL PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan katalisator dalam pembangunan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia, seperti yang tertera pada Nawacita kelima. Adapun beberapa sasaran pembangunan pendidikan yang ingin dicapai pada RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dengan meningkatnya rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf;
2. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
3. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menetapkan target yang harus dicapai setiap tahunnya selama 2016-2021. Sehingga tujuan pembangunan pendidikan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi untuk semua dapat tercapai.

Untuk melihat hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Disamping itu angka putus sekolah juga akan disajikan untuk melihat di jenjang pendidikan mana pembangunan pendidikan terkendala.

4.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis minimal dalam kalimat sederhana

yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. AMH diharapkan dapat mengukur seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan.

Tabel 4.1.1 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas yang Melek Huruf menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)					
	10-14	15-24	25-44	45+	10+	15+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan						
Laki-laki	99,95	100,00	99,87	99,22	99,71	99,68
Perempuan	99,93	99,87	99,96	97,86	99,28	99,20
Laki-Laki+Perempuan	99,94	99,94	99,92	98,53	99,50	99,44
Perdesaan						
Laki-laki	99,37	99,65	99,95	98,24	99,27	99,26
Perempuan	99,45	99,99	99,73	96,82	98,73	98,62
Laki-Laki+Perempuan	99,41	99,82	99,84	97,49	98,99	98,93
Perkotaan + Perdesaan						
Laki-laki	99,63	99,83	99,91	98,70	99,48	99,46
Perempuan	99,66	99,93	99,84	97,28	98,99	98,90
Laki-Laki+Perempuan	99,65	99,88	99,88	97,96	99,23	99,17

Sumber: Susenas Maret 2020

Untuk itu AMH menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs, yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

Kondisi keaksaraan di Sumatera Barat ditunjukkan pada Tabel 4.1.1 yang menyajikan persentase penduduk melek huruf yang berumur 10 tahun ke atas menurut tipe daerah, jenis kelamin dan kelompok umur berdasarkan hasil Susenas Maret 2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase penduduk 10 tahun ke atas yang

melek huruf sebesar 99,23 persen, sedangkan untuk yang berumur 15 tahun ke atas sebesar 99,17 persen.

Pencapaian AMH usia 45 tahun ke atas sudah cukup baik yaitu 97,96 persen. Melalui pencapaian ini, diharapkan kemampuan literasi penduduk Indonesia terhadap informasi yang tersedia semakin meningkat tajam, tidak hanya sekedar membaca tanpa meresapi dan memahami apa yang mereka baca. Dalam pembangunan berkelanjutan, kemampuan literasi penduduk bersifat multiple effect, di mana hal tersebut akan berdampak terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dilihat menurut tipe daerah, persentase penduduk melek huruf umur 10 tahun ke atas di daerah perdesaan sebesar 98,99 persen, lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan sebesar 99,50 persen. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok umur lainnya, terlihat persentase penduduk yang melek huruf di perdesaan lebih rendah dibandingkan di perkotaan. Jika dilihat menurut jenis kelamin, AMH 10 tahun ke atas yang berjenis kelamin perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan Tabel 4.1.1, ada dua hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam memacu peningkatan AMH 10 tahun ke atas yakni penduduk perdesaan dan penduduk perempuan.

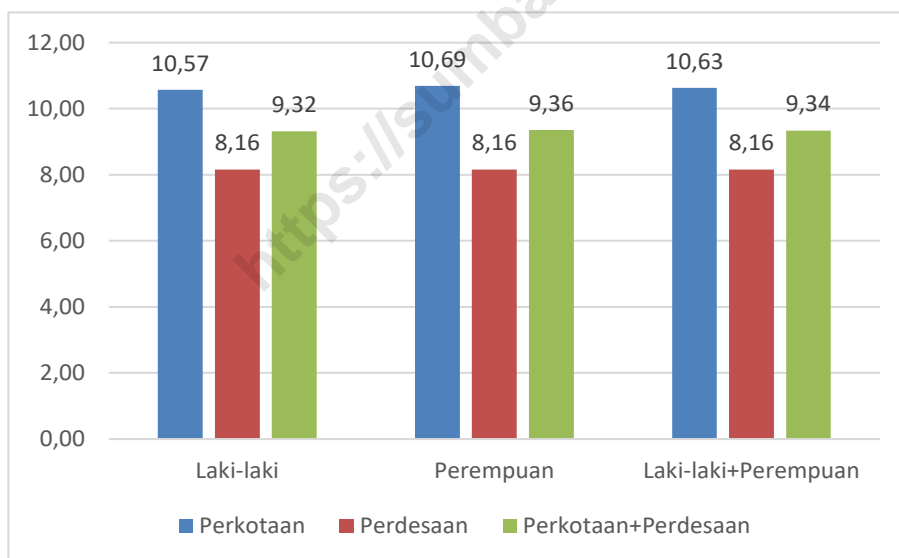
4.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah juga merupakan indikator pendidikan yang diformulasikan oleh *Unites Nations Development Programs* (UNDP) pada tahun 1990 untuk penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena rata-rata lama sekolah dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Melalui indikator ini, maka dapat terlihat sampai sejauh mana kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas, sasaran dan program pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah rata-rata lama sekolah sekurang-kurangnya 8,85 tahun dapat dicapai pada tahun 2020.

Gambar 4.2.1 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk umur 15 tahun ke atas pada tahun 2020 mencapai 9,34 tahun (setara dengan kelas 3 SMP/ sederajat). Angka ini sudah melewati target RPJMD pada tahun 2021. Hal ini berarti usaha pemerintah untuk meningkatkan kemampuan penduduk untuk mengenyam pendidikan sudah menampakkan hasil.

Gambar 4.2.1 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin di Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

Gambar 4.2.1 juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang berarti antara rata-rata lama sekolah yang dicapai antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (relatif sama yaitu lebih dari 9 tahun). Kondisi ini menunjukkan secara umum isu gender bukanlah menjadi isu kesenjangan. Rata-rata lama sekolah di perkotaan

penduduk laki-laki sebesar 10,57 tahun dan perempuan sebesar 10,59 tahun, sedangkan di perdesaan rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki dan perempuan sama sebesar 8,16 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk berumur 15 tahun ke atas di daerah perkotaan telah menuntaskan program wajib belajar 9 tahun atau tamat SMP (kelas IX) bahkan lebih, sedangkan di perdesaan secara rata-rata baru menamatkan pendidikan dasar (kelas 6 SD).

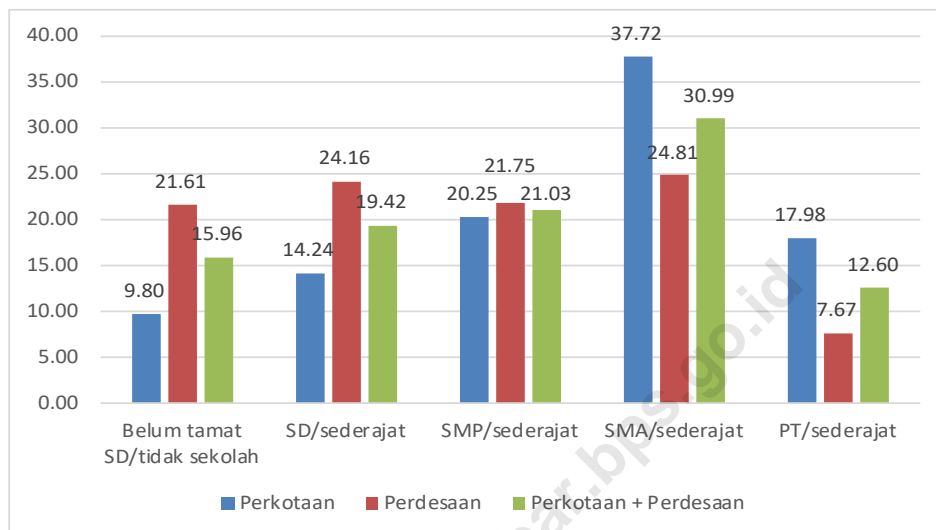
4.3 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin banyak penduduk yang berpendidikan menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Selain itu, tingginya tingkat pendidikan yang dapat dicapai dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat.

Gambaran kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) Sumatera Barat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan disajikan pada Gambar 4.3.1 dan Gambar 4.3.2 berturut-turut menurut daerah tempat tinggal dan menurut jenis kelamin.

Dari Gambar 4.3.1 terlihat bahwa persentase tertinggi adalah penduduk yang tamat SMA/ sederajat sebesar 30,99 persen, diikuti tamat SMP/ sederajat sebesar 21,03 persen, dan tamat SD/ sederajat sebesar 19,42 persen, sedangkan persentase penduduk yang tamat PT sebesar 12,60 persen. Persentase penduduk di perdesaan yang tidak pernah sekolah dan tidak tamat SD lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkotaan. Penduduk di perdesaan sebagian besar hanya tamatan SD (24,16 persen), sedangkan sebagian besar penduduk perkotaan telah mampu menyelesaikan pendidikannya hingga tamat SMA/ sederajat 37,72 persen.

Gambar 4.3.1 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2020

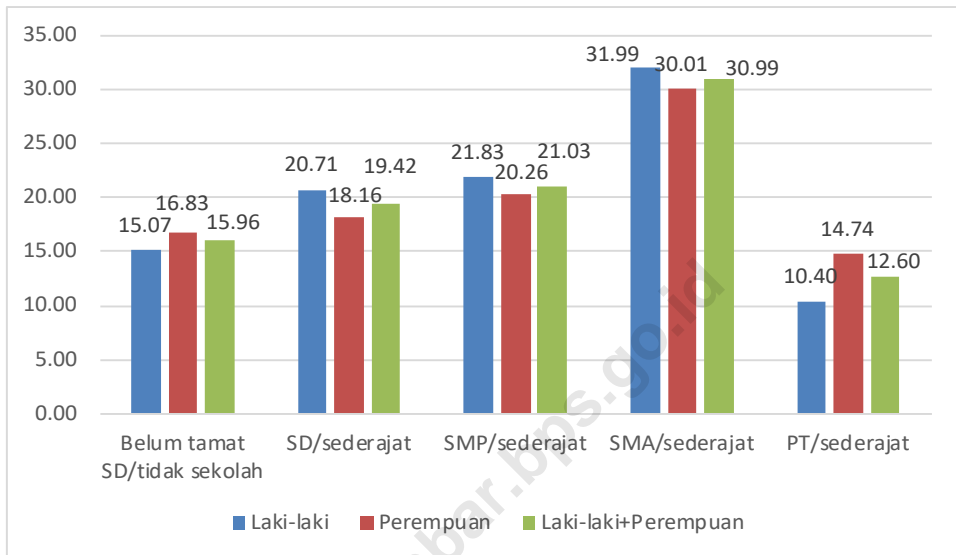


Sumber: Susenas Maret 2020

Jika dilihat menurut jenis kelamin (Gambar 4.3.2), pencapaian pendidikan antara laki-laki dan perempuan juga masih menunjukkan adanya kesenjangan. Hal ini terlihat dari lebih tingginya proporsi penduduk perempuan dibandingkan laki-laki yang belum/tidak tamat SD. Persentase perempuan yang belum pernah atau tidak tamat pendidikan SD sebesar 16,83 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki sebesar 15,07 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada persentase perempuan yang tamat SD/ sederajat (18,16 persen), tamat SMP/ sederajat (20,26 persen) dan tamat SMA/ sederajat (30,01 persen) lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki tamat SD/ sederajat (20,71 persen), tamat SMP/ sederajat (21,83 persen), tamat SMA/ sederajat (31,99 persen).

Sementara untuk jenjang perguruan tinggi, persentase penduduk perempuan yang tamat PT lebih tinggi daripada penduduk laki-laki. Masing-masing sebesar 10,40 persen untuk laki-laki dan 14,74 persen untuk penduduk perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan Sumatera Barat relatif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pencapaian Pendidikan lanjutan dibandingkan laki-laki.

Gambar 4.3.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Tipe Daerah dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Sumatera Barat, 2020



Sumber: Susenas Maret 2020

4.4 Angka Putus Sekoiah

Angka Putus Sekolah mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Hal ini dapat terjadi disebabkan oleh banyak faktor. Misalkan faktor kurangnya motivasi anak untuk bersekolah atau masalah keterbatasan ekonomi antara lain karena tidak ada biaya, bekerja, menikah/mengurus rumah tangga, tidak tersedianya fasilitas pendidikan memadai, lokasi jauh dan lain-lain. Hal tersebut di atas merupakan alasan yang biasa dijumpai di kalangan masyarakat.

Sasaran yang ingin dicapai dalam Program Indonesia Pintar melalui pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun pada RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah. Renstra Kemendikbud memiliki target angka putus sekolah hanya sebesar satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA).

Tabel 4.4.1 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tipe Daerah dan Status Ekonomi Rumah Tangga di Sumatera Barat, 2020

Tipe Daerah/Status Ekonomi Rumah Tangga	Putus Sekolah		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	0,06	0,72	0,32
40% bawah	0,14	0,80	1,24
40% menengah	0,01	0,13	0,00
20% atas	0,00	1,62	0,00
Perdesaan	0,02	0,54	0,59
40% bawah	0,01	0,78	0,43
40% menengah	0,03	0,32	0,22
20% atas	0,00	0,00	2,62
Perkotaan + Perdesaan	0,04	0,62	0,44
40% bawah	0,06	0,78	0,78
40% menengah	0,02	0,23	0,11
20% atas	0,00	1,15	0,52

Sumber: Susenas Maret 2020

Tabel 4.4.1 menyajikan angka putus sekolah menurut wilayah tempat tinggal dan status ekonomi rumah tangga yang digolongkan ke dalam golongan pengeluaran rendah, menengah dan tinggi serta menurut jenjang pendidikan. Dilihat menurut jenjang pendidikan, makin tinggi jenjang pendidikan, makin tinggi pula angka putus sekolah. Jenjang pendidikan SD sudah mencapai target RPJMN tersebut (0,04 persen), sementara angka putus sekolah SMP/ sederajat maupun SMA/ sederajat masih belum mencapai target. Angka putus sekolah di jenjang SMP/ sederajat sebesar 0,62 persen dan di jenjang SMA/ sederajat sebesar 0,44 persen.

Kenaikan angka putus sekolah dari jenjang SD sampai SMA juga terlihat di hampir semua golongan pengeluaran. Ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Sementara apabila dilihat menurut golongan pengeluaran dan wilayah tempat tinggal, pola angka putus sekolah di daerah perkotaan pada jenjang pendidikan SMP berbeda dengan angka putus sekolah pada jenjang

SD dan SMA. Angka putus sekolah SMP di daerah perkotaan terbesar pada golongan pengeluaran tinggi. Sedangkan pada jenjang SD dan SMA, angka putus sekolah di daerah perkotaan tertinggi pada golongan pengeluaran rendah. Untuk daerah perdesaan, angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP dan SMA tertinggi pada kelompok pengeluaran rendah, sedangkan pada jenjang SD angka putus sekolah tertinggi pada kelompok pengeluaran menengah.

Tingginya angka putus sekolah pada kelompok pengeluaran rendah dan menengah, sangat memprihatinkan karena pemerintah telah banyak meluncurkan program bantuan, yang bertujuan untuk menjaga agar anak-anak tetap bersekolah terutama yang berasal dari kelompok pengeluaran rendah. Misalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), Beasiswa dari pemerintah pusat dan daerah. Tingginya angka putus sekolah di golongan pengeluaran rendah juga mencerminkan bahwa program sekolah gratis untuk tingkat pendidikan dasar ternyata belum sepenuhnya terealisasi dan dinikmati oleh masyarakat luas.

PENUTUP



BAB 5

PENUTUP

Beberapa catatan penting yang dapat digunakan sebagai bahan/referensi bagi penentu kebijakan di Provinsi Sumatera Barat guna penyusunan rencana pembangunan bidang pendidikan ke depan, yaitu:

1. Partisipasi sekolah anak usia dini (3-6 tahun) baru mencapai 29,87 persen. Mengingat betapa pentingnya upaya peningkatan kualitas manusia sejak usia dini, maka program ini perlu ditingkatkan.
2. Angka partisipasi sekolah, baik APS maupun APM di ketiga jenjang pendidikan (SD, SMP dan SMA) di Provinsi Sumatera Barat, ada tendensi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, makin kecil angka partisipasinya. Kesenjangan yang terjadi sebagai akibat rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di daerah perdesaan.
3. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih buta huruf di Sumatera Barat hingga tahun 2020 semakin menurun yakni 0,83 persen. Sebagian besar penduduk buta huruf terdapat di daerah perdesaan.
4. Rata-rata lama sekolah yang dicapai oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebesar 9,34 tahun.
5. Angka putus sekolah tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan SMP di daerah perkotaan yaitu 0,72 persen sementara di perdesaan angka putus sekolah tertinggi pada jenjang pendidikan SMA yaitu 0,59 persen.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2020. Potret Pendidikan Indonesia. Statistik Pendidikan 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS. 2020. Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Barat 2020. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2019. Profil Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2018. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2020. Statistik Pendidikan Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik

BPS. 2021. Sumatera Barat Dalam Angka 2021. Padang: CV Sarana Multi Abadi

BPS. 2010. Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009 (Kajian Indikator). Jakarta: CV. Nario Sari

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2008 Tentang Wajib Belajar

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 Tentang Guru

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Revisi 18 Juli 2019)

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Unicef Indonesia. 2012. Kajian Ringkas Edisi Oktober 2012 : Pendidikan & Perkembangan Anak Usia Dini, Jakarta

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). 2009. Education Indicators Technical Guidelines.
Fulghum, Robert. 1990. All I Really Need to Know I Learned In Kindergarten. New York: Villard Books

<https://sumbar.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia



DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sumbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

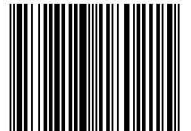
Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, 25135

Telp. 442158, 442159 Fax. 442161

E-mail : sumbar@bps.go.id

Homepage : <http://sumbar.bps.go.id>

ISSN 2723-1801



9 772723 180215